

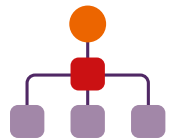
Pedoman masyarakat sipil untuk mempengaruhi proses akses OECD

Untuk bergabung dengan OECD, sebuah negara perlu menyelaraskan Undang-Undang, kebijakan-kebijakan, dan peraturan-peraturan dalam negeri dalam bidang-bidang luas tata kelola negara tersebut dengan kebijakan-kebijakan dan standar-standar OECD. Pada umumnya, penyelarasan ini memerlukan reformasi dalam negeri yang signifikan. OECD membuat peta jalan yang terperinci untuk reformasi tersebut. Pedoman ini menjelaskan proses akses yang terlihat samar, teknis, dan politis. Pedoman ini memberikan pedoman bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk digunakan demi mencapai reformasi sosial dan lingkungan hidup yang berarti di calon-calon negara anggota.



APA ITU OECD: Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang khusus mendorong perdagangan bebas dan keterbukaan pasar di seluruh dunia. Anggota-anggotanya adalah negara-negara demokratis. Pada tahun 2021, OECD beranggotakan 37 negara. Negara-negara lain telah memenuhi berbagai instrumen hukum OECD.

Bagaimana OECD bekerja: Semua keputusan penting dibuat oleh Dewan Menteri OECD, yang adalah badan politik tertinggi yang diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal dan beranggotakan duta-duta dari semua negara anggota. Sekretaris Jenderal mengetuai sekretariat OECD, yang melakukan penelitian dan pembuatan kebijakan OECD, berkoordinasi rapat dengan berbagai komite OECD. Secara total, ada lebih dari 300 komite, sub-komite, dan kelompok kerja di OECD. Setiap komite bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan mengenai isu-isu yang berbeda.



Mengapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) perlu peduli terhadap proses akses OECD: OECD fokus terhadap penanaman modal dan pasar terbuka, namun juga memiliki standar perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang tinggi. Setiap akses memberikan sebuah kesempatan untuk meningkatkan reformasi keadilan sosial dan lingkungan hidup di dalam negara yang dalam proses akses. Bergabung dengan OECD memberikan berbagai keuntungan bagi sebuah negara, seperti peningkatan reputasi sebagai negara demokrasi dengan ekonomi maju dan akses lebih luas terhadap kemitraan ekonomi dengan negara-negara OECD lainnya. Namun, untuk bergabung, negara-negara harus menyelaraskan Undang-Undang, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan-pelaksananya dengan standar-standar dan deklarasi-deklarasi OECD di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan lingkungan hidup. OMS dapat membantu memastikan negara-negara mendapatkan status keanggotaan dengan benar-benar memenuhi standar-standar kesetaraan dan kelestarian.

KOMITE-KOMITE OECD: Banyak komite-komite OECD relevan terhadap isu-isu yang berkenaan dengan masyarakat sipil, seperti:



- Komite Pertanian
- Komite Kebijakan Lingkungan Hidup
- Komite Pendampingan Pembangunan
- Komite Kebijakan Publik
- Komite Penanaman Modal (yang berfokus terhadap perilaku bisnis yang bertanggung-jawab)
- Komite Buruh dan Urusan Sosial Lainnya

Sekitar sepertiga dari 245 instrumen hukum OECD (deklarasi, rekomendasi, and konvenan) berkaitan dengan lingkungan hidup

ISTILAH-ISTILAH INTI:

- **Menaati/ketaatan:** Ketaatan adalah sebuah proses hukum yang meliputi penyelarasan dengan beberapa atau seluruh instrumen hukum OECD. Negara-negara dapat patuh terhadap sebuah instrumen OECD tanpa menjadi anggota-anggota penuh OECD.
- **Melakukan akses/aksesi:** Akses adalah sebuah proses hukum untuk bergabung dengan OECD sebagai anggota. Untuk diizinkan melakukan akses ke OECD, negara-negara diminta untuk menaati instrumen-instrumen dan kebijakan-kebijakan OECD.

Saat pertama kalinya menjajaki keselarasan dengan OECD, negara-negara dapat diundang oleh OECD untuk berpartisipasi dalam atau mengamati kerja individu komite-komite OECD. Bahkan sebelum akses dibahas, negara-negara sering kali terlebih dahulu menaati satu atau beberapa instrumen OECD.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Jika sebuah negara menyatakan akan menaati instrumen tertentu OECD, masyarakat sipil dapat mengeluarkan sebuah pernyataan terhadap komite OECD terkait, meninjau apakah benar negara itu terlihat mematuhi tujuan-tujuan instrumen tersebut.

Jalan menuju akses

Dewan Menteri itu sendiri memiliki otoritas untuk memulai proses akses calon negara anggota. Proses ini rumit dan terdiri dari beberapa langkah yang dapat dibagi menjadi tiga fase.

FASE 1 → **Sebelum Akses**

FASE 2 → **Akses**

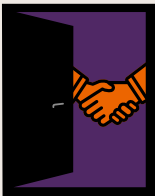
FASE 3 → **Setelah Akses**

FASE 1: Sebelum Akses



DURASI:
TIDAK DAPAT DITENTUKAN

Dalam beberapa dekade terakhir, OECD telah memfokuskan diri mengundang negara-negara Eropa dan Amerika Latin untuk melakukan akses, dengan menjaga keseimbangan dari setiap kawasan. Namun, belum jelas apakah OECD akan terus melanjutkan tren ini ke depannya.



Perdebatan politik sebelum akses:

Periode sebelum akses meliputi debat politik yang samar mengenai apakah, dan dengan runtutan seperti apa, calon-calon negara anggota akan diundang untuk melakukan akses. Diskusi dapat mulai saat:

- Calon-calon negara anggota meminta izin untuk melakukan akses, atau
- Dewan Menteri mengajukan agar sebuah negara memulai proses akses.

MENGIDENTIFIKASI SEKUTU POLITIK:

OECD menganggap bahwa akan lebih baik jika periode tinjauan komite tidak terpolitisasi. Namun, jika dianggap bisa membantu, masyarakat sipil dapat mengidentifikasi kemungkinan sekutu-sekutu di antara negara-negara anggota dan meminta para pembuat kebijakan yang kuat secara politik di sana untuk mengarahkan perwakilan-perwakilan negara mereka untuk OECD, untuk mengadvokasi persyaratan-persyaratan akses yang kuat bagi calon anggota.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Debat-debat sebelum akses terjadi di balik layar dan sangat politis, jadi, sulit bagi masyarakat sipil untuk memberikan pengaruh. Namun, jika OMS mengetahui bahwa sebuah negara sedang dipertimbangkan untuk akses, mereka dapat mencoba meminta Sekretaris Jenderal atau sekutu negara-negara anggota OECD untuk:



- Menunda akses sampai calon negara anggota sudah "siap" di mata masyarakat sipil. Hal ini bisa dicoba jika diskusi-diskusi masih dalam keadaan awal atau belum pasti mengenai akses, dan jika keadaan-keadaan sosial dan lingkungan hidup di negara tersebut buruk dalam pandangan masyarakat sipil; atau



- Hanya memperbolehkan akses jika persyaratan-persyaratan utama dibebankan kepada negara tersebut untuk dipenuhi sebelum bergabung. Pendekatan ini lebih mungkin dilakukan jika negara tersebut sudah di tengah-tengah jalur politik menuju akses.




Informasi mengenai calon-calon negara anggota: Untuk membantu Dewan Menteri mempertimbangkan kemungkinan akses sebuah negara, Divisi Hubungan Global OECD memberikan Dewan informasi komprehensif mengenai calon anggota tersebut.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil dapat menuliskan surat kepada Divisi Hubungan Global dan negara-negara anggota sekutu, memberikan masukan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan akses di calon negara anggota.

FASE 2: Aksesi

 DURASI: SEKITAR 2-3 TAHUN
(SAMPAI SAAT INI, FASE AKSESI TERLAMBA (KOLOMBIA)
SUDAH BERLANGSUNG SELAMA 7 TAHUN)

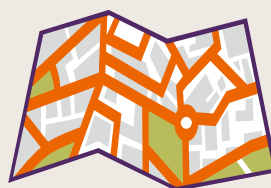
- 1 Peluncuran diskusi aksesi:** Aksesi dimulai saat Dewan Menteri secara formal memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan calon negara anggota. Hal ini biasanya dilakukan dalam salah satu rapat rutin Dewan yang terjadi dua kali dalam setahun.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil dapat mengirimkan surat-surat kepada para pembuat kebijakan, melakukan acara dengan pers, dan/atau menerbitkan pernyataan saat proses aksesi diumumkan untuk mendorong OECD agar mengambil tindakan atau pendekatan tertentu mengenai aksesi calon anggota. Masyarakat sipil juga dapat meminta izin dari OECD untuk menghadiri dan menjadi bagian dari acara peluncuran aksesi manapun.

Pengambilan keputusan OECD adalah berbasis konsensus, yang berarti semua anggota Dewan Menteri saat ini harus setuju untuk mengundang satu calon anggota untuk melakukan aksesi. Dengan demikian, setiap anggota memiliki hak veto dalam semua keputusan besar mengenai aksesi.

- 2 Peta jalan aksesi:** Selanjutnya, Sekretaris Jenderal mempersiapkan peta jalan bagi calon anggota yang berisikan syarat, ketentuan, dan proses aksesi, untuk diadopsi oleh Dewan Menteri. Karena anggota-anggota OECD harus menaati instrumen hukum dan standar yang sama, semua peta jalan aksesi calon negara anggota terlihat serupa.



- 3 Memorandum awal:** Setelah diskusi aksesi secara resmi dibuka, calon anggota menerbitkan "memorandum awal" yang menjelaskan keselarasan negara tersebut saat ini dengan instrumen-instrumen hukum OECD. Bagian-bagian relevan dari memorandum ini akan diteruskan ke komite teknis yang akan meninjau negara kandidat.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil dapat mengeluarkan sebuah pernyataan yang meninjau dan mengkritik evaluasi mandiri calon negara anggota di dalam memorandum awalnya.

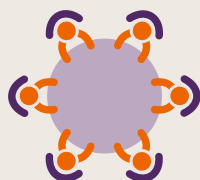


Walaupun semua komite yang relevan bagi calon negara terlibat di aksesi dan mengembangkan sebagian dari peta jalan aksesi negara tersebut, biasanya beberapa tinjauan komite tertentu lebih penting untuk calon negara anggota tertentu, tergantung isu yang relevan di negara itu. Sebagian besar proses aksesi akan melibatkan komite-komite sebagai berikut: "penanaman modal, anti suap, tata kelola perusahaan, pasar keuangan, asuransi dan pensiun pribadi, kompetisi, perpajakan, lingkungan hidup, pengelolaan bahan kimia, tata kelola publik, kebijakan peraturan, pembangunan kawasan, statistik, tinjauan ekonomi dan pembangunan, pendidikan, tenaga kerja, perburuhan, urusan sosial, kesehatan, perdagangan, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi digital dan kebijakan konsumen.

- 4 Koordinasi aksesi:** Selanjutnya, OECD mempersiapkan proses aksesi. Karena proses ini cukup bersifat teknis, hukum, dan berorientasi pada proses, Divisi Hukum mengambil peran koordinasi dan perantara antara komite-komite, Dewan Menteri, dan calon negara anggota.

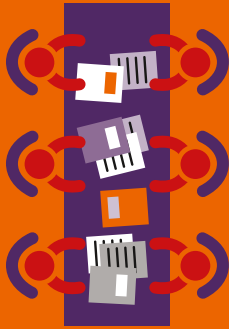
- 5 Tinjauan komite:** Setelah itu, setiap komite memulai tinjauan. Periode tinjauan komite adalah **BAGIAN PALING PENTING** dari proses aksesi, dari sudut pandang OMS.

Tinjauan-tinjauan komite adalah proses teknis, bukan politis. Sekretariat dari setiap komite mempersiapkan fakta-fakta dan analisis mengenai perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan-pelaksanaannya dari negara kandidat mengenai bidang-bidang kebijakan yang luas yang akan dipertimbangkan oleh anggota-anggota komite (perwakilan-perwakilan negara). Komite-komite biasanya bertemu dua atau tiga kali setahun. Dalam beberapa rapat pertama, komite-komite akan mempertimbangkan keadaan urusan-urusan di setiap calon negara anggota. Dalam rapat kedua atau ketiga, anggota-anggota akan mulai membicarakan persyaratan-persyaratan spesifik – seperti membuat Undang-Undang tertentu, mendanai beberapa inisiatif, atau mengadopsi kebijakan-kebijakan tertentu – mereka akan meminta negara untuk melakukan hal-hal tersebut supaya bisa dianggap memenuhi syarat untuk melakukan aksesi.



- Komite-komite sering melakukan misi pencarian fakta ke calon negara anggota untuk menyelidiki keadaan di lapangan dan bertemu dengan wartawan dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.
- Diskusi dan analisis dilakukan berulang sembari calon negara melakukan tindakan-tindakan yang direkomendasikan dan anggota-anggota komite akan menilai kembali.

Periode kunci pengaruh OMS: Periode kunci pengaruh OMS: Periode tinjauan komite adalah waktu periode pengaruh OMS yang paling penting. Masyarakat sipil dapat mendorong sekretariat komite dan negara-negara anggota untuk mengadopsi interpretasi yang paling ambisius dari ketentuan-ketentuan peta jalan, jika memungkinkan. Masyarakat sipil juga dapat membantu membentuk pertimbangan komite-komite terhadap calon anggota dengan memberikan informasi mengenai kesenjangan-kesenjangan kebijakan yang relevan kepada komite tersebut dan menyarankan solusi-solusi yang perlu komite syaratkan kepada negara bersangkutan. Masyarakat sipil harus:



- Memberikan kepada setiap komite dan negara-negara anggota target yang relevan hasil penelitian yang menggambarkan kesenjangan tata kelola dalam calon negara, yang relevan terhadap komite tersebut;
- Menjelaskan bagaimana kesenjangan-kesenjangan tersebut menunjukkan ketidaktaatan dengan standar-standar kebijakan dan tujuan-tujuan komite;
- Mengajukan reformasi-reformasi dalam negeri yang komite harus syaratkan kepada calon anggota untuk diadopsi sebelum negara tersebut diperbolehkan untuk melakukan akses; dan
- Menghadiri konsultasi-konsultasi secara langsung dengan OECD selama misi-misi pencarian fakta.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil harus juga melibatkan calon negara itu sendiri untuk membantu memperkuat dan membentuk upaya-upaya penyalarsan aksesinya.

Sayangnya, sampai saat ini, proses peninjauan dari setiap komite selalu bersifat rahasia: baik dokumen-dokumen yang terlibat maupun rapat-rapat yang terjadi tidak terbuka untuk umum.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil harus meminta setiap komite yang relevan untuk meningkatkan transparansi proses peninjauan mereka.



STANDAR TINJAUAN: Negara-negara anggota OECD tidak perlu memenuhi semua instrumen hukum OECD sebelum akses. Justru, OECD mengevaluasi kandidat negara dalam hal: 1) Kemauan dan kemampuan untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen hukum OECD dalam kompetensi komite, dan 2) Kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan-pelaksanaan yang dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan-pelaksanaan terbaik OECD dalam bidang yang relevan.

- 6 Persetujuan komite:** Setiap komite harus memberikan sebuah pendapat resmi yang mengevaluasi dua elemen dari tinjauan yang disebut di atas. Karena negara-negara dapat melakukan akses sebelum mereka benar-benar selaras dengan instrumen-instrumen dan standar-standar OECD, setiap komite dapat, bersamaan dengan persetujuan formalnya, memberikan sebuah daftar ekspektasi yang harus dipenuhi negara tersebut setelah akses.



Saat yang dapat berpengaruh bagi OMS: Jika masyarakat sipil merasa sebuah negara diberikan akses sebelum cukup selaras dengan standar-standar OECD, maka masyarakat sipil perlu mendesak komite-komite untuk membuat syarat-syarat yang terperinci untuk dipenuhi negara anggota baru itu setelah akses.



- 7 Akses dipenuhi:** Setelah semua komite yang terlibat di dalam proses telah memberikan pendapat resmi mereka, Dewan Menteri membuat sebuah keputusan final mengundang negara tersebut untuk menjadi Anggota berdasarkan evaluasi-evaluasi komite-komite teknis dan pertimbangan-pertimbangan terkait lainnya. Saat undangan diberikan, calon anggota harus mengikuti prosedur ratifikasi atau akses internal mereka, yang mungkin termasuk mengeluarkan sebuah Undang-Undang oleh parlemen negara tersebut, untuk memberikan persetujuan dalam negeri mengenai akses. Proses ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian akses antara negara tersebut dan OECD dan penyimpanan sebuah instrumen akses di OECD ke dalam Kovenan OECD.

FASE 3: Setelah Akses

 DURASI:
TIDAK DAPAT DITENTUKAN

Tinjauan setelah akses: Jika komite manapun memberikan calon negara anggota syarat-syarat untuk setelah akses, anggota baru itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut dan melaporkan kembali kepada komite. Ada dua aturan pedoman:

- Anggota baru harus membayar sendiri monitoring (laporan, biaya perjalanan, penilai ahli), dan
- Laporan monitoring harus dipublikasikan.



Saat di mana OMS dapat berpengaruh: Masyarakat sipil harus melacak kemajuan negara dalam memenuhi syarat-syarat akhir ini dan terus memberikan masukan kepada komite dan negara-negara anggota sekutu mengenai kemajuan (dan kurang majunya) anggota baru ini dalam memenuhi syarat-syarat tersebut. Masyarakat sipil dapat menyarankan langkah-langkah yang harus diambil anggota baru supaya bisa selaras.



Siapa yang dapat membantu masyarakat sipil untuk terlibat dengan proses akses OECD untuk meningkatkan reformasi hak asasi manusia, hak buruh, dan perlindungan lingkungan hidup? OECD Watch!

Jika Anda tertarik untuk memperluas reformasi melalui akses OECD mendatang, silakan bersurat elektronik ke info@oecdwatch.org.

Tentang:

OECD Watch

OECD Watch adalah sebuah jaringan masyarakat sipil dengan lebih dari 130 organisasi anggota di lebih dari 50 negara. Didirikan pada tahun 2003, OECD Watch adalah perwakilan resmi masyarakat sipil untuk Komite Penanaman Modal OECD, yang meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia. Tujuan utama OECD Watch adalah untuk membantu OMS-OMS terlibat dalam proses-proses dan instrumen-instrumen hukum OECD yang relevan untuk meningkatkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Anggota-anggota OECD Watch terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang beragam – dari hak asasi manusia hingga organisasi-organisasi lingkungan hidup dan pembangunan, dari kelompok-kelompok akar rumput hingga LSM-LSM internasional yang besar – yang berkomitmen untuk memastikan kegiatan bisnis berkontribusi terhadap pembangunan lestari dan pemberantasan kemiskinan, dan supaya perusahaan-perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak-dampak merugikannya di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.oecdwatch.org.

Conectas

Conectas ada untuk melestarikan, mengimplementasikan, dan memperluas hak asasi manusia. Lebih dari sekedar organisasi non-pemerintah, kami adalah bagian dari sebuah pergerakan yang hidup dan global, yang terus memperjuangkan hak-hak yang setara. Terhubung melalui jaringan luas mitra-mitra, yang tersebar di seluruh Brazil dan di seluruh dunia, kami selalu tersedia, dan kami berpartisipasi dalam berbagai debat pengambilan keputusan yang meningkatkan jalur hak asasi manusia dari sudut pandang Global South. Kami bekerja untuk menjaga dan memperluas hak untuk semua, khususnya bagi yang paling rentan. Kami mengajukan solusi, menghindari kemunduran, dan mencela pelanggaran untuk menciptakan transformasi-transformasi.

FIDH

FIDH (Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau International Federation for Human Rights) adalah sebuah LSM hak asasi manusia internasional yang menyatukan 192 organisasi dari 117 negara. Sejak 1922, FIDH telah membela semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijabarkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. FIDH bertindak di tingkat nasional, kawasan, dan internasional untuk mendukung anggotanya dan organisasi mitra untuk mengatasi kekerasan terhadap hak asasi manusia, termasuk memastikan akuntabilitas perusahaan dan meningkatkan akses korban terhadap keadilan melalui dokumentasi, advokasi, dan litigasi.

